

## **IBM PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PERSIAPAN ADMINISTRASI PENDIRIAN LSP DI SMKN 1 BULUKUMBA DAN SMKN 1 SELAYAR**

Nurniah<sup>1)</sup>, Muhammad Islah Idrus<sup>1)</sup>, Andi Nursyamsi Amin<sup>1)</sup>, Fatmawati<sup>1)</sup>, A. Nurul Istiyana<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang.

### **ABSTRACT**

This community service activity aims to provide training for the preparation of LSP Establishment Administration related to the operational activities of the Professional Certification Institute (LSP) as well as its guidelines and provide skills in preparing SOP documents and Certification Schemes within the operational scope of LSP P1 candidates at SMKN 1 Bulukumba and SMKN 1 Selayar. The method of activity is divided into 4 (four) stages, namely: 1) needs analysis, 2) Focus Group Discussion, 3) training in the preparation of SOP documents, Quality Guidelines, and Certification Schemes and 4) assistance in the preparation of SOPs, Quality Guidelines, and Certification Schemes. The results of the SOPs, Quality Guidelines, and Certification Schemes that have been prepared will serve as guidelines for the implementation of activities at the P1 LSP candidate. Based on the results of the documents prepared by the training participants, this science and technology activity for the community was able to increase understanding of the procedures in the operational management of LSP P1. In addition, training participants have the ability to identify the guidelines of the National Professional Certification Agency (BNSP) which are used as normative references and can implement the contents of the guidelines into the stages of activity descriptions. The training will be held on 24-26 June 2021.

**Keywords:** *Professional Certification Institute, Standard Operating Procedures, SMK, Certification Scheme.*

### **1. PENDAHULUAN**

Tujuan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan adalah menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha/industri [1]. Terkait tujuan pendidikan SMK tersebut, pada Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi siswa SMK melalui Lembaga Sertifikasi Profesi SMK (LSP SMK) menyebutkan bahwa uji kompetensi merupakan bagian dari penilaian yang khas dari SMK. Tujuan pelaksanaan uji kompetensi bagi siswa SMK adalah untuk mengukur capaian kompetensi berdasarkan skema okupasi dan atau skema kualifikasi [1]. Selain itu, sesuai isi Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi dilaksanakan agar peserta didik di SMK mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai pengakuan kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu [2].

Memiliki sertifikat kompetensi memberikan nilai tambah bagi lulusan di hadapan perusahaan atau klien. Sertifikasi menunjukkan bahwa kompetensi seseorang telah dievaluasi dan disetujui oleh pihak LSP. Dalam beberapa bidang profesi, sertifikasi sering kali dijadikan persyaratan untuk suatu pekerjaan.

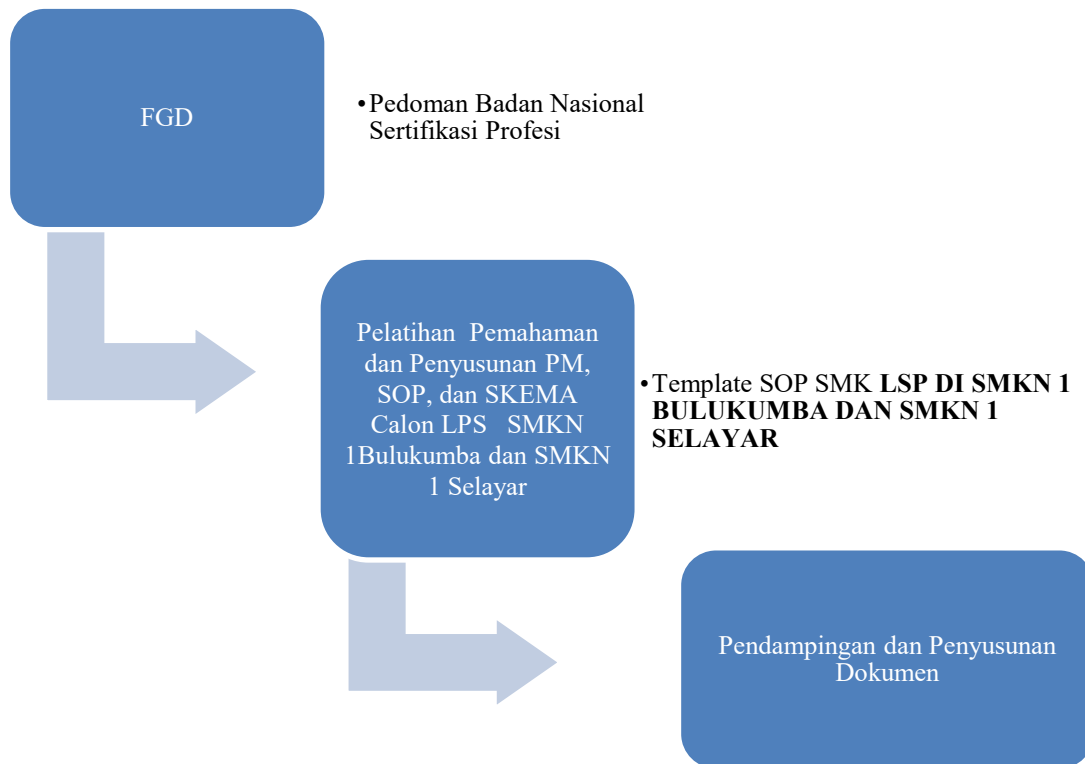
SMK Negeri 1 Bulukumba dan SMK Negeri 1 Selayar sampai saat ini belum dapat melakukan sertifikasi terhadap siswanya, berhubung kedua SMK tersebut belum memiliki lembaga sertifikasi. Alasan kedua SMK tersebut tidak membuat LSP dikarenakan tidak tahu dokumen apa yang disiapkan untuk pendirian suatu LSP. Disamping dokumen persyaratan lain yakni asesor, MUK dan perangkat lainnya juga mereka tidak punya dan tidak paham dalam pembuatannya walaupun sudah ada pernah beberapa guru berinisiatif untuk membuat namun selalu terhenti ditengah jalan jika mereka kebingungan. Oleh karena itulah tim pengabdian PNUP memberikan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan administrasi pendirian LSP di kedua SMK yakni SMKN 1 Bulukumba dan SMKN 1 Selayar.

### **2. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Terdapat 3 metode yang dilakukan dalam melaksanakan pengabdian ini yakni Forum Grup Diskusi (FGD), Pelatihan dan Pendampingan seperti gambar di bawah.

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis: Nurniah, Telp. 081342653949, [nurniah\\_poltek@yahoo.com](mailto:nurniah_poltek@yahoo.com)



Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada mitra kami sebagai berikut:

Tahap 1. Pada tahapan ini, tim pelaksana terlebih dahulu memberikan pemahaman pentingnya sertifikat kompetensi; Pentingnya sekolah mempunyai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terlisensi BNSP, Pentingnya Komitmen Pimpinan dalam pembentukan LSP. Pada tahapan ini metode FGD diterapkan sebelum tim terjun langsung ke sekolah-sekolah.

Tahap 2. Pada tahap ini dilaksanakan pelatihan Persiapan Penyusunan Administrasi Pendirian LSP, yakni persyaratan administrasi yang harus dimiliki suatu calon LSP untuk mengajukan Lisensi LSP di BNSP. Pada tahap ini dilaksanakan pelatihan dokumen persyaratan pendirian LSP yakni Panduan Mutu, SOP, dan Skema. Pemahaman Skema Sertifikasi, Pelatihan ini meliputi pengenalan SKKNI untuk semua bidang keahlian yang ada pada masing-masing jurusan di SMK.

Tahap 3. Pendampingan. Pendampingan dilakukan karena memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan pelatihan administrasi pendirian LSP.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap pertama (FGD), tim pelaksana memberikan sosialisasi *online* dengan Kepala Sekolah dan beberapa orang guru yang oleh sekolah disiapkan untuk nantinya dijadikan tim kerja dalam pembentukan LSP. Tim menyiapkan beberapa aturan/persyaratan BNSP dalam pendirian/pembentukan LSP. Memberikan pemahaman kepada kepala sekolah perlunya komitmen pimpinan dalam pembentukan LSP termasuk membantu menyiapkan dokumen Komitmen Pimpinan yang merupakan salah satu syarat dalam dokumen pendirian LSP. Materi ini dibawakan oleh Nurniah dan Muhammad Islah Idrus. Hasil dari tahap 1 komitmen pimpinan untuk mendirikan LSP dalam waktu dekat jika Administrasi pendirian LSP telah siap.



(a)



(b)

Gambar 1. Pemaparan materi dan sesi dokumentasi pada tahap FGD

Pada tahap ke dua, tim membantu ke dua SMK untuk membuat dan mendampingi administrasi pendirian LSP. Dokumen tersebut meliputi Panduan Mutu (PM) dan Standar Operasional Prosedur adalah pedoman yang mengatur tahapan suatu proses kerja. Selain itu, SOP dapat digunakan untuk menetapkan capaian-capaian dari suatu proses kerja (Nur'aini 2020). SOP disusun oleh tim yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dari tenaga pengajar. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa SMK Bulukumba dan SMK Selayar sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menyusun dokumen SOP bagi pelaksanaan kegiatan LSP P1. Tim penyusun SOP tersebut kemudian menjadi peserta pelatihan penyusunan SOP LSP P1. Tahap selanjutnya, tim pelaksana melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama peserta pelatihan untuk memahami isi acuan normatif dalam operasional aktivitas LSP P1 serta mengidentifikasi SOP yang dibutuhkan berdasarkan pedoman-pedoman BNSP. tahap selanjutnya memberikan pemahaman terkait Skema Kompetensi untuk bidang/sector yang ada pada SMK. Demikian pula memberi pemahaman terhadap kurikulum yang harus sejalan dengan skema yang digunakan dalam sertifikasi di LSP. Skema Sertifikasi merupakan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama. Pada kesempatan pelatihan diberikan contoh-contoh skema baik yang bersifat Kluster, KKNi, dan Okupasi. Materi ini dibawakan oleh A. Nursyamsi, A. Nurul Istiyana dan Fatmawati.



(a)



(b)

Gambar 2. Pemaparan materi pada tahap kedua

Pada tahap ketiga, tim memberikan pendampingan dalam penyelesaian administrasi pendirian LSP. Baik SMK 1 Bulukumba maupun SMKN 1 Selayar sampai laporan ini dikumpulkan masih didampingi dalam pembuatan administrasi persyaratan pendirian LSP. Tahap pendampingan dilakukan untuk mengevaluasi hasil Panduan Mutu, SOP dan Skema yang disusun peserta. SOP yang berhasil disusun peserta, yaitu prosedur Pendaftaran Sertifikasi, Pelaksanaan Sertifikasi. Sementara Skema yang berhasil dibuat adalah Teknisi Akuntansi Yunior dan Skema Pemasaran di SMK Bulukumba sementara di SMK Selayar Skema Teknisi Akuntansi Yunior dan skema Administrasi Pihak yang terlibat di dalam prosedur tersebut adalah :1) Manajer Sertifikasi, 2) Administrasi LSP, 3) Siswa sebagai calon asesi, dan 4) Bagian keuangan SMK.

#### 4.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dokumen SOP yang disusun oleh peserta pelatihan, dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ini mampu meningkatkan pemahaman tentang prosedur-prosedur dalam pengelolaan operasional LSP P1. Selain itu, peserta dapat mengidentifikasi acuan normatif penyusunan SOP dalam lingkup LSP sesuai pedoman-pedoman BNSP dan memiliki kemampuan mengimplementasikan isi pedoman-pedoman tersebut ke dalam prosedur.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Jakarta : Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- [2] Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78. Jakarta : Sekretariat Negara

## **6. UCAPAN TERIMA KASIH**

Pertama-tama kami mengucapkan terimakasih dan kesyukuran terhadap Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang tidak terhitung kepada kami. Tak lupa pula kami sampaikan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad, SAW yang telah mengangkat derajat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya. Kegiatan ini berlangsung dengan sukses berkat dukungan berbagai pihak yaitu Pimpinan Politeknik Negeri Ujung Padang, Ketua Jurusan Akuntansi dan jajarannya dan terutama kepada pihak SMKN 1 Bulukumba dan SMKN 1 Selayar yang sudah mempercayakan kami untuk memberikan sedikit ilmu dan kemampuan kami untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.